

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH  
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)  
KOTA SUNGAI PENUH**

**ADDRIAN ROLYES S.AP<sup>1</sup>.**

**ADE NURMA JAYA PUTRA S.Sos., M.A.P<sup>2</sup>, BENI SETIAWAN S.Sos., M.A.P<sup>3</sup>**

**STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh**

**Email:**

**Addrianrolyes79@gmail.com**

**ade.nurmajaya@gmail.com**

**Benisetiawan15208036@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the implementation of regional autonomy policies on the quality of public services at the Civil Service Agency and human resource development (BKPSDM) of Sungai Penuh City, while the population and sample in this study were 39 employees. The analytical tool used in this research is simple linear regression by performing a regression test, the results of this study indicate that the implementation of regional autonomy policies has a significant effect on the quality of public services. This is evidenced by the results of the t-test where the value of  $t_{count} > t_{table}$  ( $3.404 > 1.687$ ), while the magnitude of the influence of the implementation of the regional autonomy policy as evidenced by  $R_{square}$  is 0.238 or (23.8%), while the remaining 76.2% is influenced by other variables.*

*Keywords: implementation of regional autonomy policies, quality of public services*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara implementasi kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh, adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang berjumlah 39 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan melakukan uji regresi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Otonomi daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian t-test dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.404 > 1,687$ ), sedangkan besarnya pengaruh implementasi kebijakan Otonomi daerah yang dibuktikannya dengan  $R_{square}$  adalah sebesar 0.238 atau (23,8%), sedangkan sisanya sebesar 76.2% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci : implementasi kebijakan Otonomi daerah, Kualitas Pelayanan Publik

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 latar Belakang

Seiring dengan kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat (explosion of rising demand), tuntutan untuk mengejawantahkan cita-cita nasional melalui draft pembangunan semakin kompetitif, serta peningkatan yang tidak seimbang antara dana dan daya terhadap kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan harus benar-benar diperhatikan aspek efektivitas, efisiensi ekonomis dan akuntabel sehingga tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat segera terpenuhi. \

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengemban mandat masyarakat berupa penyediaan pelayanan publik yang merupakan harapan seluruh stakeholders sangat ditentukan oleh keberhasilan organisasi pemerintah daerah yang merupakan perangkat-perangkat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam kerangka itulah, maka terjadi perubahan mendasar menyangkut hubungan pusat-daerah yang terjadi sejak gelombang reformasi yang melanda pertengahan tahun 1997 adalah direalisasikannya kebijakan otonomi daerah yang dituangkan dalam dua paket undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diubah dengan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di mana pada pasal 4 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Kualitas pelayanan memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu tanpa kualitas pelayanan yang baik dalam suatu organisasi maka tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya masyarakat dan *stakeholders*. pengguna jasa layanan merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis, artinya menginginkan perubahan, dengan demikian kedudukan masyarakat dan *stakeholders* sebagai pengguna jasa layanan dalam organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur-unsur lain. Sehingga dalam organisasi kualitas pelayanan harus diperhatikan sebagai sumber daya organisasi untuk dapat mewujudkan tujuan kebijakan otonomi daerah.

Kondisi penerapan impelentasi kebijakan otonomi daerah ini peneliti telusuri pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh merupakan salah satu organisasi perangkat Daerah, oleh karena itu sebagai mitra pemerintah Kota Sungai Penuh dalam penyelenggaraan pemerintah Kota Sungai Penuh serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, maka badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh sangat berperan penting, dengan kata lain harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kualitas pelayanan publik yang baik agar dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah yang diinginkan. Mengingat bahwa kualitas pelayanan publik dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kualitas pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat penting.

Secara spesifik penelitian ini dilakukan pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh yang memberikan pelayanan umum dalam bidang kesejahteraan sosial sudah seharusnya memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk mendapatkan pelayanan yang demikian, pegawai badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh harus memiliki motivasi untuk mengutamakan pekerjaannya agar kualitas pelayanan publik yang diberikan dapat memuaskan masyarakat pengguna jasa layanan. Namun kenyataannya selama ini Kualitas Pelayanan yang diberikan badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh terdapat masih kurang optimal hal ini dapat dilihat fenomena pada saat peneliti melaksanakan observasi awal antara lain.

1. Dari segi ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan atau penyelesaian tugas masih kurang optimal, hal ini terlihat dalam saat pengurusan pembuatan surat izin maupun tugas belajar untuk pegawai yang membutuhkan waktu cukup lama untuk penyelesaian dalam mendapatkan surat tersebut, yang seharusnya 1 hari selesai tapi kenyataannya sampai menunggu 2 sampai 3 hari.
2. Dari segi sarana prasarana juga belum memadai hal ini terlihat dari ruang tunggu tamu yang belum memadai hal ini terlihat dari kursi tamu yang masih kurang hal ini terlihat saat menunggu di ruang tamu masih ada pengguna jasa yang berdiri saat mengantri untuk mendapatkan pelayanan hal ini dikarenakan pegawai tersebut tidak mendapatkan kursi saat mengantri,
3. Dari Segi *Responsivitas* atau melayani stakeholders dengan cepat dan tepat juga terlihat masih kurang baik hal ini terlihat saat system eror serta saat kesalahan teknis dalam pembuatan surat menurut, misalnya terdapat kesalahan nama maupun alamat dalam surat, untuk memperbaikinya stakeholders harus kembali menunggu perbaikannya,
4. Dari segi *assurance* atau tingkat perhatian dan keramahan pegawai juga kurang baik hal ini terlihat saat memberikan pelayanan terlihat masih ada pegawai yang kurang sopan menjawab atau menanggapi pertanyaan.

Berdasar latar belakang serta fenomena yang di tulis di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang "Pengaruh implementasi kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh implementasi kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh?
2. Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh implementasi kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh.

2. Besar pengaruh implementasi kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah

Sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah pengetahuan dan dapat dijadikan referensi tambahan sekaligus sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang tertarik dengan permasalahan yang serupa terkait dengan masalah pengaruh implementasi kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh. Dan bagi penulis sendiri secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan penulis dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan sekaligus membandingkan dengan teori yang telah dipelajari selama ini di bangku perkuliahan.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh, khususnya mengenai pengaruh implementasi kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **Otonomi Daerah**

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian “otonomi daerah” adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini ternyata tidak berbeda dengan Pasal 1 huruf c UU No.32 Tahun 2004 yang menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintah sendiri; dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri

Sedangkan Menurut Rudini, (1995:48) Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Untuk itu, selain diperlukan kemampuan keuangan, diperlukan juga adanya sumber daya manusia berkualitas, sumber daya alam, modal, dan teknologi.

##### **Pelayanan Publik**

Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan penentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Menurut Sinambela dalam buku Pasolong (2011: 128) pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Menurut Ratminto dan Winarsih (2012:5) pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi lain dalam buku Surjadi (2012: 7) pelayanan publik adalah upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan hubungan variabel yang akan diteliti berdasarkan perumusan masalah, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah terdiri dari variabel bebas satu (X) variabel terikat Satu (Y), Yaitu

### **1. Variabel Y (Kualitas Pelayanan Publik)**

Ratminto dan Winarsih (2012:5) pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi indikator Kualitas Pelayanan Publik (Y) dalam penelitian ini menggunakan Sinambela (2011:7) yaitu:

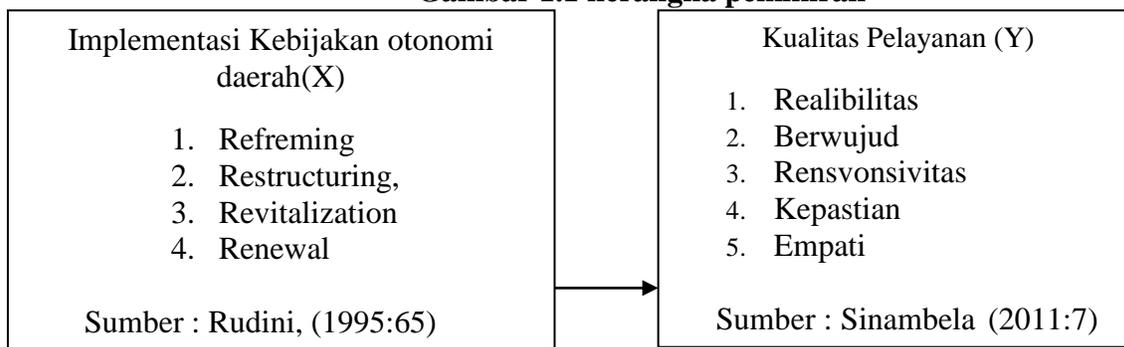
- 1) Realibilitas
- 2) Berwujud
- 3) Rensvositivitas
- 4) Kepastian
- 5) Empati

### **2. Variabel X (Otonomi Daerah)**

Menurut Rudini, (1995:48) Otonomi daerah adalah kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan, yang sebelumnya diurus pemerintahan pusat. Adapaun yang menjadi indikator Otonomi Daerah (X<sub>1</sub>) yang dijadikan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendapat Rudini, (1995:48) yaitu :

- 1) Refremining
- 2) Restructuring,
- 3) Revitalization
- 4) 4Renewal

**Gambar 1.1 kerangka pemikiran**



Skema di atas menggambarkan bahwa dalam penelitian ini akan dilihat adakah pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh

### 1.7 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2009: 64) adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan pengkajian dari uraian di atas sehingga hipotesis ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

$H_0 : r = 0$  Di duga tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Implementasi Kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh

$H_a : r \neq 0$  Di duga terdapat pengaruh yang signifikan antara Implementasi Kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

#### 2.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Sugiono (2011: 37) kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka yang diperoleh sebagai hasil pengukuran atau penjumlahan. Data-data kuantitatif inilah yang kemudian yang kemudian bisa diolah dengan teknik statistik. Teknik analisis yang

digunakan untuk menganalisis dengan melakukan perhitungan pengaruh pengaruh Implementasi Kebijakan Otonomi daerah terhadap Kualitas Pelayanan publik pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh

### 2.1.2 Populasi

Menurut Riduwan (2009: 6) populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Sugiyono (2009: 80), populasi adalah wilayah *generalisasi* yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh yang berjumlah 39 orang.

### 2.1.3 Sampel

Berdasarkan populasi tersebut, maka yang menjadi sampel penelitian adalah 39 orang. Menurut Arikunto (2006: 134), apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

### 2.1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan lainnya dalam penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah *field research*, yang dilakukan dengan cara:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan cara atau teknik untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian.

#### 2. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan menyebarkan suatu daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada responden, dalam penelitian ini penulis, menyebarkan kuesioner pada aparatur Sipil Negara (ASN) pada badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh.

### 2.1.5 Interpretasi data

#### Skala Likert

Sugiono (2009: 93) Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Setiap jawaban dari responden diklasifikasikan sebagai berikut:

SB = Sangat Baik	diberi skor	5
B = Baik	diberi skor	4
CB = Cukup Baik	diberi skor	3

TB = Tidak Baik                      diberi skor    2  
STB = Sangat Tidak Baik            diberi skor    1

Sumber: Imam Ghozali (2013:47)

### **Analisis Regresi Linear Sederhana**

Analisis Regresi Sederhana adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat (Riduwan, 2005 : 155). Menurut Ghozali (2006:82) dalam analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dependen dengan variabel independen. Artinya model regresi dapat digunakan untuk menentukan variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Sesuai dengan desain penelitian ini, dengan instrument angket skala likert maka data penelitian yang dikumpulkan berskala interval, maka untuk model penelitian ini teknik analisis yang layak digunakan adalah teknik regresi, khususnya regresi sederhana.

Persamaan regresi sederhana dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y        = Kualitas Pelayanan Publik (Variabel terikat)

a        = nilai konstanta

b        = koefisien regresi

X        = Implementasi Otonomi Daerah (Variabel bebas)

Untuk mempermudah peneliti, data di olah dengan bantuan Program SPSS Versi 17.0 For Windows

### **Koefisien determinasi**

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

$$KD = r_{xy}^2 \times 100\%$$

Dimana:

KD        = Koefisien Determinasi

$r_{xy}^2$       = Koefisien kuadrat korelasi ganda

Untuk mempermudah peneliti, data di olah dengan bantuan Program SPSS Versi 17.0 For Windows.

### **Uji t**

Uji t adalah bagian dari uji statistik yang merupakan yang digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka dihitung dengan rumus Sugiono (2009: 184) sebagai Berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

$t_{hitung}$  = Nilai

r = Nilai Koefisien Korelasi

n = Jumlah Sampel

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Regresi Linear Sederhana

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear Sederhana. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Implementasi Otonomi Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Sungai Penuh, dengan pengolahan SPSS versi 17.0 maka didapat hasil regresi sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Hasil Analisis Regresi**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.781	4.521		6.367	.000
Implementasi Otonomi Daerah	.345	.101	.488	3.404	.002

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik

Dalam penelitian ini, hasil regresi Linear Sederhana menggunakan *standardized coefficients*. Persamaan linier dari hasil regresi yang didapat adalah sebagai berikut :

$$Y = 28.781 + 0.345X$$

Keterangan :

1. Nilai  $\alpha$  (Constan) = 28.781

Artinya bila tidak ada Implementasi Otonomi Daerah (=0) maka Kualitas pelayanan Publik sebesar 28.781

Nilai  $b = 0.345$

Artinya terjadi peningkatan apabila Implementasi Otonomi Daerah ditingkatkan maka kualitas pelayanan publik akan mengalami peningkatan sebesar 0,345 atau (34.5 %)

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti variabel -variabel independennya menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali.2009). hasil perhitungan determinasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.488 <sup>a</sup>	.238	.218	3.080

a. Predictors: (Constant), Implementasi Otonomi Daerah

Nilai  $R^2$  (*r square*) sebesar 0.238 atau (23,8%) yang artinya variabel Implementasi Otonomi Daerah mampu mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Sungai Penuh sebesar 23,8% sementara sisanya sebesar 76,2% di pengaruhi faktor variabel lain.

### Uji –t ( Uji Partial)

Uji-t ini digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara Implementasi Otonomi Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada BKPSDM Kota Sungai Penuh. Ketentuan t tabel (Sugioyono 2007 :368 ) :

$\alpha = 0,05$  (satu sisi) ;  $n - 2 = 39 - 2 = 37$ , maka t tabel = 1,687

Ketentuan penerimaan hipotesis yaitu :

Ha ditolak bila sig. > 0,05 atau t hitung < t tabel

Ha diterima bila sig.  $\leq$  0,05 atau t hitung > t tabel

Berdasarkan hasil pengolahan dengan program *SPSS Versi 17.00* maka di dapat hasil uji – t, yang hasilnya dirangkum pada tabel berikut ini

**Tabel 3.3**  
**Hasil Uji – t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	28.781	4.521		6.367	.000
Implementasi Otonomi Daerah	.345	.101	.488	3.404	.002

a. Dependent Variable: Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel diatas diketahui  $T_{hitung}$  3.404 dengan nilai signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Merujuk pada perhitungan diatas maka dapat diputuskan sebagai berikut : dimana  $T_{hitung} > T_{tabel}$  atau  $3.404 > 1,687$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti Ada pengaruh yang nyata (signifikan) antara variabel Implementasi Otonomi Daerah (X) terhadap variabel kualitas pelayanan publik (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Implementasi Otonomi Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada BKPSDM Kota Sungai Penuh.

## IV.SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data pada bab III sebelumnya dengan menggunakan program *SPSS 17.00* untuk menganalisis pengaruh Implementasi Otonomi Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Sungai Penuh dengan hasil sebagai berikut:

1. Diketahui Persamaan regresi  $Y = 28.781 + 0.345X$  yang mengandung arti jika tidak ada kenaikan nilai variabel Implementasi Otonomi Daerah (X) maka Kualitas Pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci (Y) Sebesar 28.781 dan apabila Implementasi Otonomi Daerah di tingkatkan maka Kualitas Pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Sungai Penuh akan mengalami peningkatan sebesar 0.345 atau (34,5%).
2. Untuk mengetahui sebesar apakah Implementasi Otonomi Daerah mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Sungai Penuh dapat dilihat pada hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ). Dari olah data diperoleh determinasi sebesar 0.238 atau (23,8%). Ini berarti Implementasi Otonomi Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Sungai Penuh kabupaten Kerinci sebesar 23.8% .
3. Untuk melihat tingkat signifikan atau tidaknya berpengaruh variable independen terhadap variable dependen dilakukan uji t. berdasarkan uji t, dari hasil regresi nilai  $t_{hitung}$  Implementasi Otonomi Daerah adalah 3.404 jika dibandingkan dengan signifikan yang telah ditentukan yaitu  $\alpha = 0,05$  ( $t_{tabel} = 1,687$ ) maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3.404 > 1,687$ ), dengan demikian  $H_0$  diterima dalam arti kata Implementasi Otonomi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada BKPSDM Kota Sungai Penuh kabupaten Kerinci.
- 4.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih Kepada LPPM STIA Nusantara sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN-MAHA), Serta pembimbing 1 dan 2 serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam jurnal ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Antonius. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Dwiyanto, A. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Riduwan. 2003. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfabeta

- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2012). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rudini, 1995. *Otonomi Daerah dan Tantangan*, Jakarta : PT Sinar Agape Press
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & ,* Alfabeta :Bandung.
- Sugiono.2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Refika Aditama. Bandung
- Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011 .*Reformasi Pelayanan Publik*.Jakarta:BumiAksara
- Wurangian. 2012. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah